

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Fenomena ini diawali ketika Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mulai menyusun dan mengumumkan nama-nama kabinet dengan nama Kabinet Kerja. Pada penelitian ini, peneliti ingin melihat bagaimana surat kabar harian (SKH) membingkai berita pengumuman Kabinet Kerja bentukan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Khusus SKH, pemberitaan mengenai pengumuman Kabinet Kerja serentak diberitakan pada tanggal 27 Oktober 2014 dan diletakkan pada halaman depan atau dijadikan sebagai *headline*, dengan berbagai macam judul yang dituliskan. Kompas menuliskan judul Saatnya Bekerja, Jawa Pos Kocok Ulang Di Saat Akhir, Tempo Kabinet Jokowi Tak Istimewa, Republika Menteri Langsung Bekerja, Kedaulatan Rakyat Menteri dari Parpol Dipertanyakan dan Sindo Selamat Bekerja Kabinet Kerja. Melihat kondisi ketika SKH secara serempak memberitakan dan meletakkan peristiwa pengumuman kabinet pada *headline* mengindikasikan adanya nilai berita (*news value*) yang tinggi dalam peristiwa pengumuman Kabinet Kerja Jokowi-JK. Dalam arti sesungguhnya ada makna dalam peristiwa pengumuman Kabinet Kerja yang diberitakan oleh keenam SKH.

Berbicara pengumuman Kabinet Kerja sama halnya menyinggung pemilihan presiden (Pilpres), drama pengumuman Kabinet Kerja diawali dengan munculnya peristiwa pemilihan presiden (Pilpres) yang selalu penting untuk dibahas serta diberitakan oleh SKH, karena menyangkut kursi parlemen dalam menentukan calon yang akan mengisi

kekuasaan eksekutif serta menentukan arah politik bangsa Indonesia. Menilik kembali sistem Pilpres seperti yang dipaparkan Thoha (2014:127), di tahun 1999 sistem Pilpres masih dipilih oleh MPR, kemudian pada tahun 2004 dan 2009 sistem pilpres mengalami perubahan. Pilpres dilakukan secara demokratis, artinya rakyat dapat memilih capres dan cawapres secara langsung, selain melihat bagaimana sistem pemilihan presiden dan wakil presiden, peneliti juga melihat jumlah kandidat capres dan cawapres yang sebelumnya selalu diikuti lebih dari dua calon pasangan di tahun 2004 dan 2009, alasannya jumlah calon pasangan menentukan jumlah koalisi yang akan terbentuk (*Presidensial Thershold*). Namun menariknya di tahun 2014 hanya ada dua calon pasangan yang bertarung dalam pilpres, yakni pasangan Prabowo Subianto-Hatta Radjasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Hal ini kemudian memunculkan banyak dugaan dari kalangan partai politik yang kemudian diberitakan oleh SKH, bahwa pertarungan pilpres diprediksi berjalan keras dan menjadi ajang *head to head* sehingga mengerucut pada pembentukan dua koalisi besar.

Menanggapi kerasnya pertarungan pilpres 2014 yang diikuti oleh dua pasangan saja dan akan menjadi laga keras dalam sejarah pilpres Indonesia, dibenarkan oleh Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya. Berikut kutipan Yunarto pada Media *online* detik.com (7/5/2014):

"Melihat konstelasi terakhir, memang pertarungan Pilpres sepertinya akan mengarah kepada 2 pasang saja, akan terjadi head to head"

(Sumber: detik.com, 7 Mei 2014)

Isi pemberitaan mengarah pada pertarungan *head to head* Jokowi vs Prabowo yang kemudian mengerucut pada pembentukan koalisi. Jumlah kandidat capres yang bertarung, menentukan jumlah koalisi yang akan terbentuk. Jelas, pertempuran tidak berhenti sampai di pilpres, namun akan berlanjut saat pemilihan dan pengumuman nama calon menteri.

Iklim pertempuran pilpres yang diprediksi keras dan alot benar adanya ketika koalisi merah putih (KMP) bertempur dengan Koalisi yang menyokong Jokowi sebagai capres (kini bernama KIH) dinyatakan sebagai pemenang dalam pilpres 2014, hal ini mengokohkan posisi Jokowi yang diusung partai pendukung sebagai pemimpindi pemerintahan, namun di sisi lain PDIP mengalami kekalahan suara di tubuh parlemen yang telah dikuasai oleh Koalisi Merah Putih (KMP).

Menyadari kekalahan dalam tubuh parlemen, Jokowi pun harus berkoalisi dengan partai lain atau membentuk koalisi guna memperkuat suara di parlemen. Muncul nama Koalisi Indonesia Hebat (KIH) sebagai koalisi tandingan KMP. Dalam menentukan arah dukungan kepada pemerintahan, KIH bentukan Megawati Soekarnoputri terdiri dari PDIP, NASDEM, HANURA, PKB, dan PKPI, sedangkan KMP yang terdiri dari partai Golkar, PAN, Gerindra, PKS, dan PBB tidak mendukung pemerintahan Jokowi-JK. Berjalannya waktu PPP dan PAN menggeser haluan dan mengarahkannya kepada Jokowi. Selanjutnya, Partai Demokrat yang tidak memiliki koalisi tetap menyatakan dirinya “netral”.

Terbentuknya KIH mengindikasikan bahwa Jokowi harus membagi-bagikan kursi menteri kepada partai pendukungnya. Hal ini yang membuat pertempuran semakin terlihat dan isu tersebut ditampilkan

oleh SKH dalam bentuk pemberitaan perseteruan dua koalisi tersebut. KMP selaku koalisi tandingan dari KIH mengkritik Jokowi-JK dalam memilih nama calon menteri, salah satunya ketika Jokowi menjanjikan kursi menteri yang diisi dari kalangan profesional, namun KMP mempertanyakan kembali kebijakan Jokowi dalam memilih nama menteri, karena pada akhirnya Jokowi tetap memasukkan beberapa nama menteri yang berasal dari partai pendukung pemerintah (KIH).

Perseteruan mengenai pemilihan nama kabinet antara KIH dan KMP terus berlanjut dan diberitakan oleh SKH. Jokowi sempat mengundang pihak KMP untuk mengisi kursi menteri namun ditolak secara tegas, alasannya KMP tetap solid dalam mengawasi kinerja pemerintahan dan tidak akan menerima pinangan dari KIH. Oleh karena itu dalam menyusun kabinet di awal pemerintahan berlangsung sangat alot, karena selain mempunyai basis politik sendiri, presiden terpilih masih dihadapkan dengan parpol pendukung yang minta jatah di kabinet. Menurut Salam (dalam Simarmata, 2014:32) pemerintahan koalisi merupakan pemerintahan yang terbentuk dari bergabungnya dua atau lebih partai politik untuk membentuk pemerintah, sehingga berujung pada pembagian kekuasaan di kabinet. Istilah bagi-bagi kursi yang mungkin dilakukan oleh Presiden Jokowi akan berdampak pada pemilihan nama-nama menteri. Dalam pemerintahan koalisi di Indonesia, rawan terjadi konflik antar anggota koalisi, sehingga pemerintahan tidak berjalan efektif, akibatnya mekanisme *checks and balances* tidak berjalan Simamarta, (2014:34).

Lebih lanjut, Presiden Jokowi yang sebelumnya membuka “kran” politik kepada KMP mengenai tawaran kursi menteri menemui jalan buntu, yang mana pada akhirnya Presiden Jokowi dan Wakil Presiden

Jusuf Kalla resmi mengumumkan 34 nama menteri dengan nama Kabinet Kerja. Proses tarik ulur pengumuman Kabinet Kerja kemudian diberitakan oleh SKH Kompas, Jawa Pos, Tempo, Republika, Kedaulatan Rakyat dan Sindo dengan *angle* yang berbeda dan diletakkan pada *headline*. Hal ini dapat dilihat dari pemilihan judul, *lead*, isi berita, pemilihan narasumber, penambahan foto dan tabel sebagai penguat data.

Sobur (2006:167) mengatakan, apabila satu media apalagi sejumlah media meletakkan sebuah peristiwa sebagai *headline*, maka diasumsikan peristiwa itu pasti memperoleh perhatian yang besar dari khalayak. Ini tentu berbeda jika peristiwa tersebut dimuat di halaman dalam, bahkan dipojok bawah. Setiap peristiwa yang dianggap dapat menarik minat pembaca, selalu dijadikan *headline* atau diletakkan pada halaman depan surat kabar. Pandangan ini didasarkan pada anggapan bahwa umumnya pembaca ketika akan membaca atau membeli surat kabar, yang pertama dilihatnya adalah *headline* berita pada hari itu.

Penting bagi penulis melihat pengumuman Kabinet Kerja karena pemberitaan pengumuman Kabinet Kerja Jokowi-JK mendapat perhatian besar tidak hanya dari kalangan masyarakat dan partai politik namun media khususnya media cetak (SKH) juga menunggu peristiwa pengumuman kabinet untuk diberitakan, hingga akhirnya pemberitaan pengumuman Kabinet Kerja resmi diumumkan dan dijadikan sebagai *headline* oleh keenam SKH edisi 27 Oktober 2014.

Lebih lanjut usai dilantik isu pemberitaan calon menteri kabinet Jokowi-JK ramai dikabarkan di SKH. SKH Kompas, Jawa Pos, Tempo, Republika, dan Sindo memberi *space* besar pada halaman depan, dengan judul yang berbeda-beda. Kompas memberi judul Saatnya Bekerja, Jawa Pos dengan judul Kocok Ulang Di Saat Akhir, Republika dengan judul

Menteri Langsung Bekerja, Tempo dengan judul Kabinet Jokowi Tak Istimewa, Sindo memberi judul Saatnya Bekerja Kabinet Kerja dan Kedaulatan Rakyat dengan judul Menteri Dari Parpol Dipertanyakan.

Pengumuman kabinet dinilai penting karena peristiwa pengumuman terus-menerus mundur, sekalipun presiden mengklaim bekerja lebih cepat dari jatah 14 hari yang telah ditentukan undang-undang. Ditambah dengan rekomendasi KPK dan PPATK yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan pemilihan nama calon menteri. Proses pemilihan hingga pengumuman nama kabinet, juga diwarnai kegaduhan politik antara dua koalisi besar yakni KIH dan KMP yang sama-sama ingin menguasai pemerintah eksekutif dan yudikatif. Munculnya dua koalisi dinilai berpengaruh terhadap pemilihan nama calon menteri yang akan dipilih Jokowi-JK.

Lebih lanjut, peneliti juga melihat berita *headline* pengumuman Kabinet Kerja pada enam surat kabar Kompas, Jawa Pos, Tempo, Republika, Sindo dan Kedaulatan Rakyat. Alasan peneliti memilih enam SKH, karena peneliti melihat ada keragaman dari masing-masing SKH. Artinya, keenam SKH yang telah dipilih sebagai subjek penelitian memiliki warna yang berbeda-beda. Warna yang dimaksud adalah pemikiran atau ideologi serta kebijakan dari masing-masing SKH ketika mengkonstruksi peristiwa pengumuman Kabinet Kerja. Dengan kata lain, bagaimana berita yang sama dikemas sesuai dengan cara pandang yang dibuat oleh tiap-tiap SKH sehingga menghasilkan *frame* yang berbeda-beda.

Lebih jauh alasan peneliti memilih keenam SKH karena setiap SKH menunjukkan sebaran oplah dalam jumlah besar yang tersebar pada

tiap-tiap lingkup lokal, regional dan nasional. Di sisi lain popularitas keenam SKH sudah cukup dikenal oleh masyarakat Indonesia.

Setelah membahas alasan memilih keenam SKH, lebih jauh peneliti juga melihat slogan keenam SKH seperti Jawa Pos “Selalu Ada Yang Baru”, Kompas “Amanah Hati Nurani Rakyat, Republika “Pegangan Kebenaran”, Tempo “Enak Dibaca dan Perlu”, Sindo “Sumber Referensi Terpercaya” dan Kedaulatan Rakyat “Berguna Bagi Orang Lain”. Penggambaran slogan dari masing-masing SKH menunjukkan bagaimana keenam SKH memberitakan pengumuman Kabinet Kerja sesuai dengan karakter yang digambarkan masing-masing slogan. Slogan yang berbeda menunjukkan visi yang berbeda sehingga mempengaruhi karakteristik penulisan berita dari masing-masing SKH, dengan kata lain peristiwa yang sama dikemas secara berbeda karena setiap SKH memiliki visi yang berbeda.

Berbicara mengenai karakteristik penulisan berita ada kaitannya dengan kebijakan pemberitaan Hamad, (2004:2-3) menjelaskan ada dua faktor yang mempengaruhi kebijakan pemberitaan, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal berupa kebijakan redaksional tertentu mengenai suatu kekuatan politik, kepentingan politik para pengelola media, relasi media dengan sebuah kekuatan politik tertentu, artinya media yang melakukan pembelaan kuat terhadap sebuah kekuatan politik maka dapat dikatakan media tersebut memiliki tujuan politik di balik teks yang dibuatnya untuk kepentingan parpol atau media itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal seperti tekanan pasar pembaca atau pemirsa, sistem politik yang berlaku, dan kekuatan-kekuatan luar lainnya. Media seperti ini lebih mengutamakan peristiwa yang menonjol dari sebuah parpol sebagai komoditas berita tanpa pembelaan ideologis terhadap

kekuatan politik itu, maka media tersebut lebih berorientasi pada keuntungan ekonomi semata ketimbang isi berita.

Melihat lebih dalam *headline* Pengumuman Kabinet Kerja Jokowi-JK, maka peneliti menggunakan model analisis *framing* Zhondhang Pan dan Gerald M. Kosicki. Menurut Pan dan Kosicki *frame* diartikan sebagai pusat organisasi ide yang dihubungkan dengan elemen berbeda-beda dalam bentuk teks berita (seperti kutipan sumber, latar informasi, pemakaian kata atau kalimat tertentu, foto dan tabel) ke dalam teks secara keseluruhan untuk mendukung ide utama (Eriyanto, 2004:252).

Memperjelas organisasi ide suatu pemberitaan yang ditulis oleh wartawan, maka menurut Eriyanto (2004:255), Pan dan Kosicki menggunakan empat struktur untuk mengetahui bagaimana media menyusun dan menulis berita. Elemen tersebut meliputi struktur Sintaksis (cara wartawan menyusun fakta), Skrip (cara wartawan mengisahkan fakta), Tematik (cara wartawan menulis fakta), dan Retoris (cara wartawan menekankan fakta). Empat elemen tersebut adalah perangkat-perangkat yang digunakan dalam model *framing* Pan dan Kosicki untuk membongkar satu per satu elemen berita dari SKH ketika mengemas suatu peristiwa, mulai dari judul berita hingga kalimat penutup serta foto atau tabel sebagai penguat data.

I.2 **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang dipaparkan dalam latar belakang masalah, maka dapat disimpulkan rumusan masalah dalam penelitian, yaitu “Bagaimana pembingkai berita mengenai pengumuman Kabinet Kerja Jokowi-JK edisi 27 Oktober 2014

pada *headline* surat kabar harian Kompas, Jawa Pos, Tempo, Republika, Sindo dan Kedaulatan Rakyat?

I.3 **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pembingkai berita yang dilakukan oleh Surat Kabar Harian (SKH) dalam *headline* pengumuman Kabinet Kerja Jokowi-JK edisi 27 Oktober 2014.

I.4 **Batasan Penelitian**

I.4.1 **Objek penelitian**

Bingkai pengumuman Kabinet Kerja Jokowi-JK edisi 27 Oktober 2014 dengan alasan bahwa pada tanggal 27 Oktober 2014 seluruh media massa khususnya surat kabar harian (SKH) meletakkan berita pengumuman Kabinet Kerja pada *headline*.

I.4.2 **Subjek Penelitian**

Peneliti membatasi pada surat kabar Kompas dengan judul *Saatnya Bekerja*, Jawa Pos dengan judul *Kocok Ulang Di Saat Akhir*, Republika dengan judul *Menteri Langsung Bekerja*, Tempo dengan judul *Kabinet Jokowi Tak Istimewa*, Sindo dengan judul *Selamat Bekerja Kabinet Kerja* dan Kedaulatan Rakyat dengan judul *Menteri Dari Parpol Dipertanyakan*

I.5 **Manfaat Penelitian**

I.5.1. **Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis penelitian ini adalah untuk menambah kajian ilmu komunikasi yang berkaitan dengan analisis *framing* sehingga hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi landasan pemikiran atau referensi untuk penelitian-penelitian sejenis selanjutnya.

1.5.2 Manfaat Akademik

Memberikan data secara kualitatif tentang perspektif yang digunakan oleh SKH Kompas, Jawa Pos, Republika, Tempo, dan Sindo dalam memberitakan peristiwa pengumuman Kabinet Kerja Jokowi-JK. Selain itu diharapkan publik bertindak netral dalam menanggapi peristiwa pengumuman Kabinet Kerja.